

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Penelitian**

Indonesia merupakan negara berkembang yang sedang melakukan pembangunan di segala bidang. Pembangunan di Indonesia dimaksudkan untuk mewujudkan cita-cita nasional, yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia, memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.

Sektor publik adalah suatu entitas yang mempunyai aktivitas yang berhubungan dengan usaha menghasilkan barang dan pelayanan publik dalam memenuhi kebutuhan publik (Mardiasmo, 2009:2). Organisasi sektor publik merupakan organisasi yang berorientasi pada publik/masyarakat. Segala tindakan dan kebijakan yang dilakukan dalam suatu organisasi sektor publik wajib mengutamakan kepentingan masyarakat dan memberikan pelayanan yang maksimal kepada masyarakat. Orang-orang dalam organisasi sektor publik diberikan kepercayaan oleh masyarakat dalam melayani masyarakat, maka dari itu kinerja suatu organisasi sektor publik menjadi perhatian utama masyarakat dalam menentukan disalahgunakannya kepercayaan yang diberikan.

Kinerja sektor publik sebagian besar dipengaruhi oleh kinerja instansi. Kinerja instansi merupakan gambaran mengenai tingkat pencapaian sasaran instansi pemerintah sebagai penjabaran dari tujuan, misi dan visi instansi pemerintah yang terwujud dalam tingkat keberhasilan/kegagalan pelaksanaan kegiatan-kegiatan sesuai

dengan program dan kebijakan yang telah ditetapkan. Unit-unit kerja organisasi publik diharapkan dapat menciptakan lingkungan kerja yang kondusif dengan menginteraksikan kemampuan pimpinan dan kemampuan bawahan. (Putri, 2010).

Penilaian kinerja menjadi sorotan banyak pihak terlebih dengan adanya otonomi daerah yang memberikan kewenangan lebih luas kepada pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat seperti yang diamanatkan dalam UU nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. Suatu pengukuran kinerja manajerial yang sah dan dapat dipercaya mutlak diperlukan untuk menilai prestasi manajer dan unit organisasi yang dipimpinya. Maka pengukuran kinerja manajerial instansi pemerintah patut mendapatkan perhatian yang serius sebab berkaitan dengan tanggung jawab.

Menurut Mohamad Mahsun (2012:148) ukuran ukuran yang dijadikan tolak ukur dalam menilai kinerja yaitu pertama indikator Masukan (*Input*) yang meliputi jumlah dana yang dibutuhkan, jumlah pegawai yang dibutuhkan, jumlah infrastruktur yang ada dan jumlah waktu yang digunakan. Kedua, indikator proses (*Process*) yang meliputi ketaatan pada peraturan perundangan dan rata-rata yang diperlukan untuk memproduksi atau menghasilkan layanan jasa. Ketiga, indikator keluaran (*Output*) yang meliputi jumlah produk atau jasa yang dihasilkan dan ketepatan dalam memproduksi barang atau jasa. Keempat, indikator hasil (*Outcomes*) yang meliputi tingkat kualitas produk atau jasa yang dihasilkan dan produktivitas para karyawan atau pegawai. Kelima, indikator manfaat (*Benefit*) yaitu meliputi tingkat kepuasan masyarakat, dan tingkat partisipasi masyarakat. Keenam, indikator dampak (*Impact*)

yang meliputi peningkatan kesejahteraan masyarakat dan peningkatan pendapatan masyarakat.

Fenomena yang terjadi tentang kinerja instansi di Pemerintah Kota Bandung tahun 2017 yaitu hasil penelitian lembaga survei Veritas bersama timnya menyorot pada permasalahan utama yang diinginkan masyarakat teratasi mengenai masalah perekonomian, banjir, dan kemacetan. Menurutnya, kinerja Wali Kota Bandung Ridwan Kamil dianggap buruk. Dibandingkan dengan 5 tahun yang lalu periode Dada Rosada mengalami penurunan pendapatan sebesar 43,13%. Masalah kemacetan juga, dinilai masyarakat sebanyak 89% semakin parah. Jumlah tersebut menunjukkan masalah macet tidak teratasi. Selain itu 62% masyarakat berpendapat bahwa banjir belum teratasi selama lima tahun ini. (<http://prfmnews.com/berita.php?detail=email-dinilai-gagal-atasi-masalah-utama-kota-bandung> diakses minggu, 08 April 2018 pada pukul 09.35)

Selain itu fenomena yang terjadi di Pemerintah Kota Bandung adalah Sekitar 1000 dari total 7000 Aparatur Sipil Negara (ASN) di Kota Bandung memiliki kinerja rendah atau dibawah 50% yang dapat diketahui melalui sistem Elektronik Remunerasi Kinerja (ERK). Berdasarkan hasil evaluasi, kinerja PNS yang paling baik rata rata bekerja di kecamatan dengan memperoleh angka 90%, sedangkan kinerja yang paling rendah terdapat di beberapa dinas seperti Dinas Perhubungan, Dinas Pendidikan, serta Satpol PP. Para ASN yang kinerjanya dibawah 50% tidak akan memperoleh tunjangan kepegawaian daerah (TKD). Sementara untuk ASN yang kinerjanya dibawah 75% tidak akan mendapatkan kenaikan pangkat di akhir tahun

([https://www.antaranews.com/berita/632022/1000-asn-di-kota-bandung-berkinerja-rendah](https://www.antaranews.com/berita/632022/1000-asn-di-kota-bandung-berkinerja-<u>rendah</u>) diakses minggu, 08 april 2018, pada pukul 09:35)

Adapun fenomena lainnya yaitu pada tahun 2016, Anggota Komisi C DPRD Kota Bandung Riantono, prihatin sampah masih menjadi masalah besar di Kota Bandung. Riantono mengatakan, Pemkot Bandung sudah memberikan subsidi kepada PD. Kebersihan sebesar Rp. 105 miliar, sesuai dengan permintaan mereka. Kemudian ada tambahan dana untuk penyapu jalan di kewilayahan yang menyebabkan anggaran dana tersebut berbeda dengan anggaran yang ada di PIPPK. Riantono juga mengatakan disetiap kewilayahan sudah ada anggaran, sekitar Rp 53 miliar, untuk kebersihan taman dan jalan, untuk 151 kelurahan. terangnya. Selain itu Riantono menerangkan bahwa semua tarif dikelola oleh PD. Kebersihan tersebut, tidak masuk ke APBD karena mereka BUMD. Oleh karena itu, mereka mengelola keuangan sendiri. Dengan masih menjadi masalah di Kota Bandung, berarti pengelolaan sampah belum baik. (<http://ayobandung.com/read/20160326/64/8360/anggaran-sampah-bandung-besar-kok-masih-masalah> diakses tanggal 08 April 2018, pukul 10.00).

Pengelolaan keuangan daerah merupakan suatu kegiatan yang akan mempengaruhi peningkatan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat dan bangsa Indonesia. Kewajiban seluruh instansi baik di pemerintah pusat dan daerah untuk menyusun laporan keuangan sebagai wujud akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Terwujudnya akuntabilitas keuangan daerah akan menjadi landasan awal bagi tata kelola pemerintahan yang lebih baik (*Good Governance*) dan segala

pertanggungjawaban keuangan yang berasal dari dana masyarakat akan berjalan lancar seiring kepercayaan masyarakat terhadap pemerintahan dalam bidang pengelolaan keuangan daerah.

Wiguna, (2015) menyatakan bahwa akuntabilitas pengelolaan keuangan berkaitan erat terhadap kinerja instansi pemerintah daerah. Memantapkan mekanisme akuntabilitas, diperlukan manajemen kinerja yang baik. Penerapan berbagai aturan perundang - undangan yang ada terkait dengan penerapan konsep akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan diharapkan dapat mewujudkan pengelolaan pemerintah daerah yang baik dan berpihak kepada rakyat. Implementasi akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah ini diharapkan mampu meningkatkan kinerja pemerintah daerah.

Annisanigrum (2010) mengatakan akuntabilitas adalah mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada entitas pelaporan dalam mencapai tinjauan yang telah ditetapkan secara periodik. Akuntabilitas merupakan kewajiban menyampaikan pertanggungjawaban atau untuk menjawab atau menerangkan kinerja dan tindakan seorang/badan hukum/pimpinan kolektif suatu organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau berkewenangan untuk meminta keterangan yang akan dipertanggungjawabkan.

Akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah merupakan proses pengelolaan keuangan daerah mulai dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pertanggungjawaban, serta pengawasan keuangan daerah. Hal tersebut harus benar-benar dapat dilaporkan dan dipertanggungjawabkan kepada masyarakat dan DPRD

terkait dengan kegagalan maupun keberhasilannya sebagai bahan evaluasi tahun berikutnya. Masyarakat tidak hanya memiliki hak untuk mengetahui pengelolaan keuangan daerah tetapi berhak untuk menuntut pertanggungjawaban atas pengaplikasian serta pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah tersebut (Halim, 2007).

Sebagai upaya konkrit untuk mewujudkan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara/daerah adalah penyampaian laporan pertanggung-jawaban keuangan pemerintah yang memenuhi prinsip tepat waktu dan dapat diandalkan (*reliable*) serta disusun dengan mengikuti Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang telah diterima secara umum. Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 21 tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

Lismawati (2013), Siringoringo (2009), Sari (2013), dan Asrida (2012) dalam Natak Riswanto (2016), menyatakan bahwa ada pengaruh transparansi terhadap kinerja pemerintah daerah, dengan transparansi yang dilakukan secara baik dan memang benar transparan maka akan memberikan pengetahuan langsung kepada publik dan pengawasan yang lebih baik kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan kinerja pemerintah daerah secara khusus dan umum dapat meningkat sesuai kegiatan yang telah dilakukan dan diawasi.

Menurut Hari Sabarno (2007:38) transparansi merupakan salah satu aspek mendasar bagi terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang baik. Perwujudan tata pemerintahan yang baik mensyaratkan adanya keterbukaan, keterlibatan, dan

kemudahan akses bagi masyarakat terhadap proses penyelenggaraan pemerintah. Keterbukaan dan kemudahan informasi penyelenggaraan pemerintahan memberikan pengaruh untuk mewujudkan berbagai indikator lainnya.

Andrianto (2007:35) memaparkan bahwa transparansi pengelolaan keuangan adalah proses keterbukaan dan kejujuran kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah dalam sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada peraturan perundang-undangan

Ahmad (2013) menunjukkan bahwa responsibilitas berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja instansi pemerintah daerah, terbukti dengan kurangnya pelayanan yang diberikan oleh aparatur instansi dalam mendukung kualitas pelayanan publik sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Respon aparatur dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab masih kurang menunjukkan perilaku positif, sehingga menimbulkan sejumlah kelemahan responsibilitas dalam melayani masyarakat, faktor ini mengakibatkan hasil kerja aparatur kurang optimal.

Menurut Ratminto dan Winarsih (2007) responsibilitas adalah ukuran yang menunjukkan seberapa besar tingkat kesesuaian antara penyelenggaraan pemerintah dengan hukum atau peraturan dan prosedur yang telah ditetapkan. Selain itu, menurut Dwiyanto, (2008) responsibilitas menjelaskan apakah pelaksanaan kegiatan organisasi publik itu dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip administrasi yang benar atau sesuai dengan kebijakan organisasi, baik yang eksplisit maupun implisit.

Friedrick (2011) mendefinisikan bahwa tanggung jawab pengelolaan keuangan adalah konsep yang berkenaan dengan standar profesional dan kompetensi teknis yang dimiliki administrator publik untuk menjalankan tugasnya dan bertanggung jawab atas segala tindakannya

Penelitian ini merupakan penelitian replikasi dari penelitian yang dilakukan oleh Daniel Aditya Utama, Rediana Setiyani (2014) dengan judul “Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi dan Tanggung Jawab Terhadap Kinerja Guru” dan penelitian yang dilakukan oleh Natak Riswanto (2016) dengan judul “Analisis Pengaruh Akuntabilitas Dan Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Jember”.

Selain teori tersebut, penelitian ini pernah dilakukan sebelumnya oleh Nuzul Ibnu Hajar (2017) mengenai “Pengaruh Transparansi dan Akuntabilitas terhadap Kinerja Pengelola Anggaran pada UPTD Taman Budaya Sulawesi Tenggara”. Perbedaan penelitian ini dengan yang sebelumnya adalah pertama, lokasi penelitian, peneliti sebelumnya melakukan penelitian pada Taman Budaya Sulawesi Tenggara sedangkan penelitian ini dilakukan di Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Kota Bandung. Kedua, penelitian sebelumnya menggunakan 2 variabel independen yaitu transparansi dan akuntabilitas sedangkan di penelitian ini ditambahkan 1 variabel lagi yaitu tanggung jawab dan variabel dependennya pada penelitian terdahulu menggunakan Kinerja Pengelola Anggaran sedangkan pada penelitian ini menggunakan Kinerja Instansi Pemerintah Daerah.

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis bermaksud untuk melakukan penelitian yang berjudul : **“Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi, dan Responsibilitas Pengelolaan Keuangan Terhadap Kinerja Instansi Pemerintah Daerah (Survei pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di Wilayah Pemerintah Kota Bandung)**

## **1.2 Rumusan Masalah Penelitian**

Berdasarkan uraian pada latar belakang penelitian di atas, maka penulis mengemukakan beberapa rumusan masalah yang akan diteliti adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana akuntabilitas pengelolaan keuangan pada SKPD di Pemerintahan Kota Bandung
2. Bagaimana transparansi pengelolaan keuangan pada SKPD di Pemerintahan Kota Bandung
3. Bagaimana responsibilitas pengelolaan keuangan pada SKPD di pemerintah Kota bandung
4. Bagaimana Kinerja Instansi Pemerintah Daerah pada SKPD di Pemerintah Kota Bandung
5. Seberapa besar pengaruh akuntabilitas pengelolaan keuangan terhadap kinerja instansi pemerintah daerah pada SKPD di Pemerintah Kota Bandung
6. Seberapa besar pengaruh transparansi pengelolaan keuangan terhadap kinerja instansi pemerintah daerah pada SKPD di Pemerintah Kota Bandung

7. Seberapa besar pengaruh responsibilitas pengelolaan keuangan terhadap kinerja instansi pemerintah daerah pada SKPD di Pemerintah Kota Bandung
8. Seberapa besar pengaruh akuntabilitas, transparansi dan responsibilitas pengelolaan keuangan terhadap kinerja instansi pemerintah daerah pada SKPD di Pemerintah Kota Bandung

### **1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian**

#### **1.3.1 Maksud Penelitian**

Maksud penelitian ini adalah untuk memenuhi salah satu syarat dalam memenuhi ujian Sarjana Ekonomi Program Studi Akuntansi. Dan untuk mengumpulkan data, menganalisis, mengetahui, dan menjelaskan mengenai Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi, dan Responsibilitas Pengelolaan Keuangan terhadap Kinerja Instansi Pemerintah Daerah (Survey pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di Wilayah Pemerintah Kota Bandung

#### **1.3.2 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah diuraikan, maka tujuan yang ingin dicapai oleh penulis dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis akuntabilitas pengelolaan keuangan pada SKPD di Pemerintah Kota Bandung
2. Untuk mengetahui dan menganalisis transparansi pengelolaan keuangan pada SKPD di Pemerintah Kota Bandung

3. Untuk mengetahui dan menganalisis responsibilitas pengelolaan keuangan pada SKPD di Pemerintah Kota Bandung
4. Untuk mengetahui dan menganalisis Kinerja Instansi Pemerintah Daerah pada SKPD di Pemerintah Kota Bandung
5. Untuk mengetahui dan menganalisis besarnya pengaruh akuntabilitas pengelolaan keuangan terhadap Kinerja Instansi Pemerintah Daerah pada SKPD di Pemerintah Kota Bandung
6. Untuk mengetahui dan menganalisis besarnya pengaruh transparansi pengelolaan keuangan terhadap Kinerja Instansi Pemerintah Daerah pada SKPD di Pemerintah Kota Bandung
7. Untuk mengetahui dan menganalisis besarnya pengaruh responsibilitas pengelolaan keuangan terhadap Kinerja Instansi Pemerintah Daerah pada SKPD di Pemerintah Kota Bandung
8. Untuk mengetahui dan menganalisis besarnya pengaruh akuntabilitas, transparansi dan responsibilitas pengelolaan keuangan terhadap Kinerja Instansi Pemerintah Daerah pada SKPD di Pemerintah Kota Bandung

#### **1.4 Kegunaan Penelitian**

Penelitian ini mempunyai dua manfaat, yaitu kegunaan secara praktis dan kegunaan secara teoritis yang akan dijelaskan sebagai berikut:

### **1.4.1 Kegunaan Teoritis**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna dan bermanfaat bagi berbagai pihak yang membutuhkan. Adapun manfaat atau kegunaan yang dapat diperoleh antara lain:

#### **1. Bagi Penulis**

- a. Untuk memenuhi salah satu syarat dalam menempuh ujian sidang dan untuk meraih gelar sarjana (S1) pada Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Pasundan.
- b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperluas wawasan dan pengetahuan mengenai metode penelitian yang menyangkut masalah akuntansi sektor publik.
- c. Hasil penelitian ini juga akan melatih kemampuan teknis analitis yang telah diperoleh selama mengikuti perkuliahan dalam melakukan pendekatan terhadap suatu masalah, sehingga dapat memberikan wawasan yang lebih luas dan mendalam berkaitan dengan masalah yang diteliti.

#### **2. Bagi Penelitian Selanjutnya**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan referensi khususnya bagi pihak-pihak lain yang meneliti dengan kajian yang sama yaitu Akuntabilitas, Transparansi, Responsibilitas Pengelolaan Keuangan, dan Kinerja Instansi Pemerintah Daerah.

### 3. Bagi Pemerintah

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai keadaan Akuntabilitas, Transparansi, Responsibilitas Pengelolaan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah Daerah khususnya pada Pemerintah Kota Bandung.

a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menghimpun informasi sebagai bahan sumbangan pemikiran untuk dijadikan sebagai bahan masukan dan pertimbangan bagi pemerintah daerah guna meningkatkan kinerja dalam pengorganisasian kinerja Instansi Pemerintah Daerah kota Bandung.

#### b. Bagi Pembaca

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran awam mengenai pengaruh Akuntabilitas, Transparansi, dan Responsibilitas Pengelolaan Keuangan Terhadap Kinerja Instansi Pemerintah Daerah pada Pemerintah Kota Bandung,.

#### **1.4.2 Kegunaan Praktis**

Penelitian ini diharapkan dapat menambah pemahaman dalam memperbanyak pengetahuan yang berhubungan dengan Akuntabilitas, Transparansi, Responsibilitas dan Kinerja Instansi Pemerintah Daerah pada Dinas Pemerintah Kota Bandung. Serta dapat mengetahui seberapa besar pengaruh Akuntabilitas, Transparansi, dan Responsibilitas terhadap Kinerja Instansi Pemerintah Daerah Kota Bandung

### **1.5 Lokasi dan Waktu penelitian**

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis melakukan penelitian pada delapan belas Dinas di Pemerintah Kota Bandung yaitu :

1. Dinas Pendidikan
2. Dinas Kesehatan
3. Dinas Sosial dan penanggulangan kemiskinan
4. Dinas Tenaga Kerja
5. Dinas Perhubungan
6. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
7. Dinas Kebudayaan dan pariwisata
8. Dinas Penataan Ruang
9. Dinas Pekerjaan Umum
10. Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman, Pertanahan dan Pertamanan
11. Dinas Kebakaran dan Penanggulangan Bencana
12. Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah
13. Dinas Perdagangan dan Perindustrian
14. Dinas Pangan dan Pertanian
15. Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah
16. Dinas Komunikasi dan Informasi
17. Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
18. Dinas Pemuda dan Olahraga

Penulis melaksanakan penelitian pada waktu yang telah ditentukan.